



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**UNIT KERJA** : BADAN PENGHUBUNG DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ENDRIE DJOKO SATRIO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **249711**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.994.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
5. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **55.000.000**

1. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **126.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **45.670.000**



## F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

## Sub Total

Rp. 2.221.170.000

## III. HUTANG

Rp. 67.162.553

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.154.007.447

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.